



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2021-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dapat terselesaikan tepat waktu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian adalah panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja lima tahunan (2021-2026) sekaligus evaluasi terhadap capaian kegiatan pada periode sebelumnya, Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 - 2025 Kabupaten Dharmasraya dan RPJMD tahun 2021-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan serta visi dan misi Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra ini berisi tentang sasaran Strategis serta program/kegiatan berdasarkan permendagri no 90 tahun 2019 serta perubahan RPJMD dan RKPd.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Renstra ini dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kami sangat membutuhkan saran dan kritikan demi kesempurnaan Renstra Dinas Pertanian ini.

Pulau Punjung, Mei 2021
KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB.DHARMASRAYA



DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	30
3.3. Telaahan Renstra kementrian dan provinsi	32
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	40
3.5. Penentuan isu-isu strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian. Sebagai perangkat daerah maka dinas pertanian berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.

Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan selama lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2021-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Reformasi perencanaan dan penganggaran 2021-2026 mengharuskan Dinas Pertanian untuk merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka performancebased budgeting.

Kedudukan Renstra Dinas Pertanian sangatlah penting artinya bagi semua Stakeholder lingkup Pertanian karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian, selain hal itu para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Dinas Pertanian kemudian dirangkum menjadi rancangan

awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Dharmasraya untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan strategi mengembangkan dunia usaha pertanian dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Renstra Dinas Pertanian disusun dalam mendukung kegiatan daerah, provinsi serta program nasional, maka dalam penyusunan renstra mempunyai keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pertanian serta Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) RPJMD 2021-2026

Keterkaitan dengan RPJMD adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani dengan strategi mengelola sumber daya pertanian serta peningkatan produksi komoditi pertanian sesuai dengan misi ke-3 dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing dengan tujuan Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing.

2) Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Sasaran Strategis dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Sasaran Strategis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yaitu Sasaran Strategis.

4) Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 maka memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementan tersebut dalam rangka mencapai sasaran strategis Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.

Keterkaitan tersebut dapat disajikan dalam tabel 1.1. berikut:

K/L (Kementan)	Dinas PTPH Prov. Sumatera Barat	Dinas PKH Prov. Sumatera Barat	RPJMD	Dinas Pertanian
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri dengan indikator Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya produksi Peternakan	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pendapatan petani dengan sasaran Peningkatan Produksi produk unggulan Pertanian serta Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian didasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- b. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- c. Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang - undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan menteri pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- j. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026
- k. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian
- 2) Mendorong penguatan fungsi Dinas Pertanian sebagai institusi pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian

3) Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan dokumen Renstra Dinas, Dinas Pertanian mengacu kepada permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya susunan garis besar dokumen renstra Dinas Pertanian kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra-PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Pertanian, Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Tantangan dan Peluang Pengembangan sektor Pertanian.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementan, telaahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Dinas Pertanian disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif, kelompok sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bab tambahan untuk mengemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka Perubahan Renstra Dinas Pertanian ini akan digunakan untuk penyusunan Renja Dinas Pertanian tahun-tahun berikutnya, dan pada akhir periode RPJMD, Renstra Dinas Pertanian ini sebagaimana RPJMD juga akan digunakan sebagai penyusunan Renja masa transisi Dinas Pertanian.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

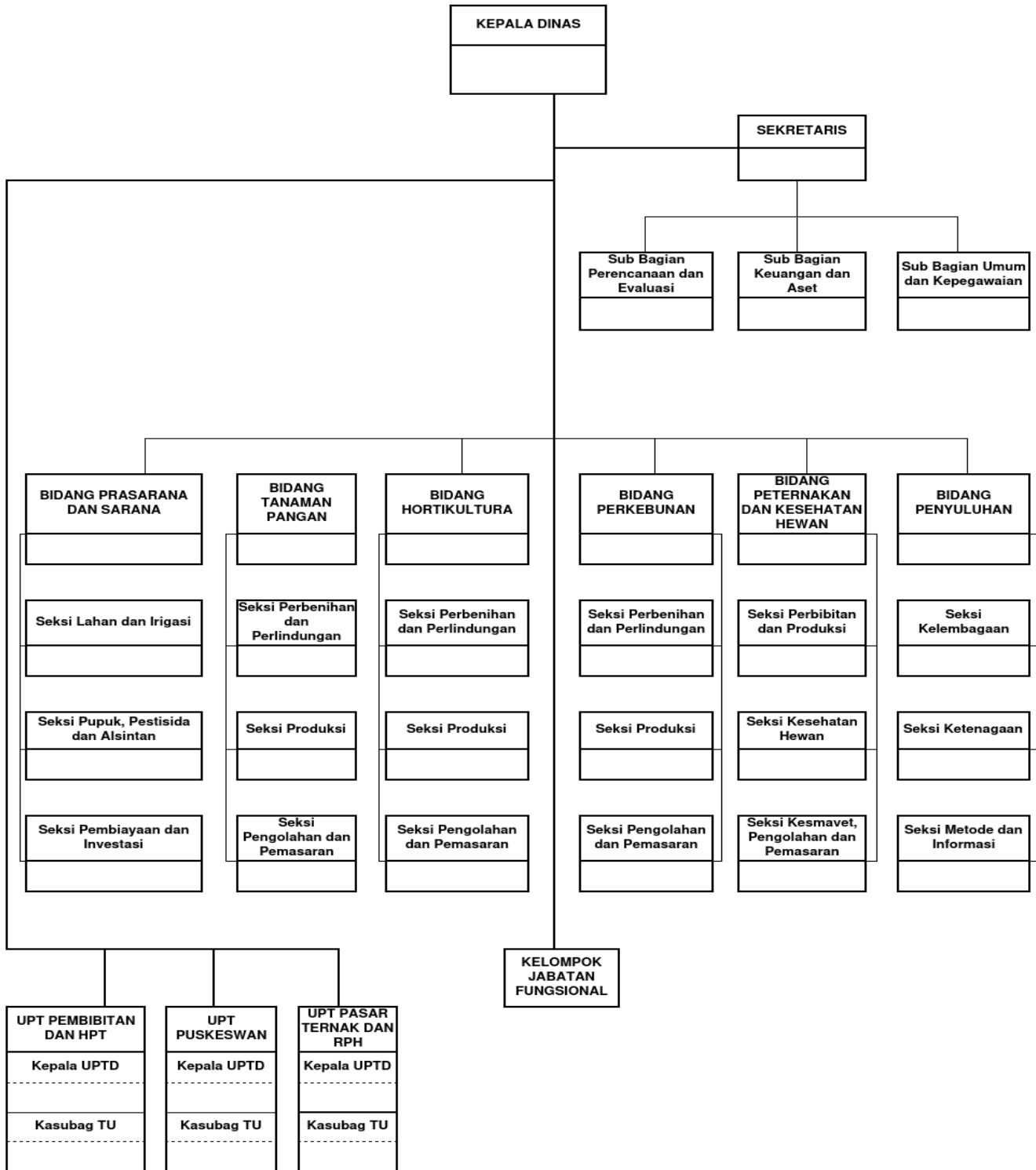
Dinas Pertanian (Distan) mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian.

2. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyeliaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- g. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- h. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- i. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA



2.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya didukung oleh personil yang produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.1. s.d 2.3. berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian pegawai berdasarkan status

URAIAN	PNS	CPNS	THL	HONDA	JUMLAH
JUMLAH	122	-	106	3	231

Tabel 2.2.
Pembagian pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

URAIAN	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
JUMLAH	7	102	33	1	1	69	6	6

Tabel 2.3.
Pembagian pegawai berdasarkan jabatan

URAIAN	Ess 2	Ess 3	Ess 4	JFU / Pelaksana	Fungsional Tertentu
JUMLAH	1	7	26	39	48

b. Sarana dan Prasarana

Tabel Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung usaha pertanian di Kabupaten Dharmasraya, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	BP3K/BPP	11 Unit
2	BBI Tanaman Padi	1 Unit
3	Unit Brigade Sungai Dareh	1 Unit
4	Pos Pengendali OPT	10 Unit
5	UPT Puskesmas	5 Unit
6	UPT Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH)	1 Unit
7	UPT Pembibitan Ternak dan HPT	1 Unit
8	Mobiler dan Peralatan Kantor	Terlampir
9	Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Terlampir

Sarana dan Prasarana tersebut di atas, meskipun dirasakan kurang tetapi selama ini telah menjadi penunjang bagi Dinas Pertanian dalam melaksanakan program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Pertanian Kabupaten Dharmasraya, yakni untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di daftar Lampiran.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB di Kabupaten Dharmasraya, sebesar 27.19% pada tahun 2020 pada perhitungan Angka Sangat Sementara BPS, namun kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan distribusi persentase PDRB -0,76%. Hal ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan sawah, serta terjadinya penjualan hasil komoditi pertanian ke daerah luar Dharmasraya dengan harga yang rendah. Penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian.

Kinerja Pelayanan yang disajikan adalah tingkat kinerja Dinas pertanian berdasarkan target renstra periode sebelumnya (renstra periode 2016-2021), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Produksi Padi

Produksi padi yang dihitung adalah Gabah Kering Panen yang ada di 11 kecamatan dengan luas sawah 6.785,10 Ha. Adapun produksi padi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5.
Produksi padi menurut kecamatan
Kabupaten dharnasraya tahun 2016 -2020

NO	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Sungai Rumbai	ton	0	0	0	0	0
2.	Koto Besar	ton	789	430	559	193	1124
3.	Asam Jujuhan	ton	81	470	556	18	9

NO	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	Koto Baru	ton	6.186	6.655	7187	9.189	6935
5.	Koto Salak	ton	6.361	6.945	9047	7.684	6532
6.	Tiumang	ton	5.320	5.075	5936	4.967	4902
7.	Padang Laweh	ton	1.260	979	1417	1.575	1704
8.	Sitiung	ton	18.592	15.728	18849	19.448	21922
9.	Timpeh	ton	3.450	4.174	5214	4.083	5447
10.	Pulau Punjung	ton	12.024	12.087	16465,0	15.573	13437,0
11.	IX Koto	ton	5.216	5.723	6974	5.112	5102
	Total	ton	59.279	58.266	72.204	67.842	67.114

Sumber: Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian

Produksi padi tersebut setelah dikonversi menjadi beras telah mencapai surplus untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Dharmasraya, perhitungan surplus tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6.
Perhitungan Produksi dan Kebutuhan Beras (Surplus/Defisit)
Kabupaten dharnasraya tahun 2016 -2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi					
- Produksi GKP (ton)	59.279	58.266	72.204	67.842	67.114
- Konversi GKP – GKG	86,02%	86,02%	86,02%	86,02%	86,02%
- Produksi GKG	50.992	50.120	62.110	58.358	57.731
- Konversi GKG – beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%
- Produksi beras	31.992	31.446	38.968	36.614	36.221
Konsumsi lokal					
- Jumlah penduduk	229.313	235.476	212.653	241.517	247.579
- Tingkat konsumsi beras / tahun	110	110	110	110	110
- Konsumsi beras (kg)	25.224.430	25.902.360	23.391.830	26.566.870	27.233.690
- Konsumsi beras (ton)	25.224	25.902	23.392	26.567	27.234
Surplus/defisit beras	6.768	5.543	15.576	10.047	8.987

Sumber : 1. Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian
2. Dharmasraya Dalam Angka 2016 sampai 2020

Data pada tabel 2.6. menunjukkan produksi beras mencapai surplus setiap tahunnya, penurunan produksi pada tahun 2017 merupakan dampak dari perbaikan / rehab jaringan irigasi primer dan sekunder oleh BWS V Sumatera Barat, pada rencana produksi periode 2021-2026 diprediksi akan meningkat.

2. Produksi Jagung

Produksi Jagung yang ada di 11 kecamatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel 2.7. berikut:

Tabel 2.7.
Produksi Jagung menurut kecamatan
Kabupaten dharnasraya tahun 2016 -2020

NO	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Pulau Punjung	ton	41	1.961	1.491	568	52
2.	Sitiung	ton	710	3.696	1.656	702	640
3.	Koto Baru	ton	68	623	244	150	17
4.	Sungai Rumbai	ton	32	1.517	673	187	29
5.	IX Koto	ton	194	3.015	1.074	147	260
6.	Timpeh	ton	65	2.469	744	646	349
7.	Tiumang	ton	869	1.828	1.530	1.009	626
8.	Koto Salak	ton	401	5.614	4.138	941	1.439
9.	Padang Laweh	ton	0	682	1.852	106	330
10.	Koto Besar	ton	203	956	988	343	298
11.	Asam Jujuhan	ton	7	997	880	462	0
	Total	ton	2.590	23.358	15.270	5.261	4.040

Sumber : Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian

Data pada tabel 2.7. menunjukkan peningkatan produksi jagung yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018 merupakan perluasan lahan tanam jagung pakan ternak pada lahan sawah yang kering dampak dari perbaikan / rehab jaringan irigasi primer dan sekunder oleh BWS V Sumatera Barat.

3. Produksi Kelapa Sawit

Produksi Kelapa Sawit pada kebun rakyat yang ada di 11 kecamatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8.
Produksi Kelapa Sawit Rakyat menurut kecamatan
Kabupaten dharnasraya tahun 2016 -2020

NO	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Pulau Punjung	ton	21.735	14.119	8.406	9.205	9.274
2.	Sitiung	ton	20.125	7.821	9.653	10.494	10.520
3.	Koto Baru	ton	2.780	1.538	2.819	2.482	2.524
4.	Sungai Rumbai	ton	4.194	2.566	3.272	3.781	3.842
5.	IX Koto	ton	6.397	2.498	4.750	4.940	4.950
6.	Timpeh	ton	47.158	34.838	29.229	36.348	36.282
7.	Tiumang	ton	11.240	4.838	4.009	3.760	3.797
8.	Koto Salak	ton	8.781	4.324	5.124	6.195	6.256
9.	Padang Laweh	ton	16.283	7.112	3.327	5.945	5.987
10.	Koto Besar	ton	38.171	21.192	9.160	12.225	12.275
11.	Asam Jujuhan	ton	20.605	7.819	5.989	9.251	9.285
	Total	ton	197.470	108.593	85.471	104.626	104.993

Sumber : Bidang Perkebunan Pangan Dinas Pertanian

Data pada tabel 2.8. menunjukkan penurunan produksi kelapa sawit yang signifikan disebabkan banyak tanaman dari perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah tua dan tidak berproduksi maksimal, serta banyak juga dari tanaman tersebut yang tidak menggunakan bibit unggul yang bersertifikat.

4. Produksi Karet

Produksi Karet di 11 kecamatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9.
Produksi Karet menurut kecamatan
Kabupaten Dharnasraya tahun 2016 -2020

NO	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Pulau Punjung	ton	8.612	4.563	4.602	5.612	5.624
2.	Sitiung	ton	2.770	1.080	1.038	1.270	1.275
3.	Koto Baru	ton	4.412	2.394	2.163	1.989	1.996
4.	Sungai Rumbai	ton	4.946	3.606	3.925	2.749	2.756
5.	IX Koto	ton	4.988	1.229	1.796	2.708	2.725
6.	Timpeh	ton	2.083	1.651	1.510	1.487	1.496
7.	Tiumang	ton	1.192	985	964	386	387
8.	Koto Salak	ton	3.635	2.858	2.892	2.405	2.410
9.	Padang Laweh	ton	1.079	1.104	1.072	1.606	1.609
10.	Koto Besar	ton	7.583	6.848	7.129	5.778	5.784
11.	Asam Jujuhan	ton	4.091	2.695	2.737	3.625	3.627
	Total	ton	45.389	29.019	29.832	29.615	29.690

Sumber : Bidang Perkebunan Pangan Dinas Pertanian

5. Produksi Daging dan Populasi Ternak

Produksi daging serta opulasi ternak di 11 kecamatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.10.
Produksi Daging dan Populasi Ternak
Kabupaten Dharnasraya tahun 2016 -2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Produksi Daging	ton	1.155	1.254	4.617	4.187	6.340
2.	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	48.279	46.045	46.993	48.062	49.043

6. Penurunan Kasus/Kejadian Penyakit Hewan Menular

Penurunan Kasus/Kejadian Penyakit Hewan Menular dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel 2.11. berikut:

Tabel 2.11.
Kasus/Kejadian Penyakit Hewan Menular
Kabupaten Dharnasraya tahun 2016 -2020

TAHUN	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR			JUMLAH
	ZOONOSIS	STRATEGIS	PHM	
2016	144	254	591	989
2017	141	917	4.186	5.244
2018	138	889	3.297	4.324
2019	120	778	865	1.763
2020	112	580	1.030	1.722

Data pada tabel 2.11. menunjukkan peningkatan kasus penyakit hewan yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018 merupakan akibat dari banyaknya ternak masyarakat yang terkena jembrana sehingga banyak menyebabkan kematian pada komoditi sapi, namun ada tahun 2019 dan 2020 mulai melihat penurunan.

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan lima tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian.

Peningkatan pendapatan petani melalui penguatan dan peningkatan produk dari komoditi pertanian dihadapkan pada beberapa permasalahan serta tantangan yang sangat perlu jadi perhatian stakeholder atau pemangku kebijakan terkait kontribusi pertanian dalam meningkatkan PDRB kedepannya.

1. Tantangan

a. Lahan

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif. Menyusutnya area lahan pertanian Kabupaten Dharmasraya akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian secara efektif tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun konversi lahan pertanian masih terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga telah berupaya dalam melindungi lahan pertanian dengan mengeluarkan Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai amanat UU Nomor 41 tahun 2009.

Penurunan tingkat produksi pertanian terkait kurangnya lahan sawah juga disebabkan kemampuan cetak sawah oleh Pemerintah belum sesuai dengan laju konversi lahan sawah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan persoalan masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

Pola tanam serta pengetahuan petani juga mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian mengalami penurunan kualitas bahkan beberapa masuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan pemakaian bahan kimia anorganik yang berlebihan yang berakibat pada struktur tanah menjadi padat dan daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman menurun. Jika

kondisi ini tidak segera ditangani, maka kerusakan lahan akan semakin meluas dan berakibat pada penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

b. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani, terutama kurang memadainya jaringan irigasi tersier yang sudah banyak rusak.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usaha tani, jalan produksi, dan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

c. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian.

Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/keompok tani

sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan

- Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani yang berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian.

Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa.

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap menurunnya minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami

perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

d. Pasar Bebas

Dengan berlakunya Pasar Bebas, semua produk dari dalam dan luar negeri akan bebas keluar masuk Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut merupakan ancaman bagi usaha pertanian yang masih mempunyai produktivitas dan mutu yang rendah, serta masuknya produk dari luar daerah yang berdampak turunnya daya jual produk pertanian daerah, persoalan ini juga ditambah dengan adanya penjualan gabah ke luar daerah dengan harga yang rendah oleh para pembeli.

e. Tingginya Angka Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya pertumbuhan penduduk baik dengan kelahiran maupun perpindahan penduduk dari daerah lain akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan yang akan membuat berkurang stock akan bahan pangan tersebut terutama bahan pangan asal padi.

f. Keadaan Geografis

Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi geografis $0^{\circ} 47'7''$ LS - $1^{\circ} 41'56''$ LS dan $101^{\circ} 9'21''$ - $101^{\circ} 54'27''$ BT, dengan Ketinggian dari permukaan laut antara 82 m sampai dengan 1.525 m dan luas 2.961,13 Km². Letak geografis Daerah pada posisi silang tiga provinsi Sumatera Barat Jambi dan Riau, serta 8 Kabupaten (Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Bungo, Tebo dan Kerinci) sangat strategis karena merupakan pusat pertumbuhan baru dalam kerangka kerja sama regional IMS-GT. Dengan demikian posisi Kabupaten Dharmasraya yang berperan sebagai pintu gerbang akan lebih mudah mengakses pusat pertumbuhan tersebut yang diharapkan sebagai pasar dari berbagai komoditi yang dihasilkan daerah ini.

g. Iklim.

Kabupaten Dharnasraya adalah termasuk pada daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 30°C - 36°C dengan curah hujan rata-rata

213,02mm/bulan. Kondisi ini cukup kondusif untuk mendukung kegiatan budidaya dan mengembangkan komoditi pertanian.

h. Tofografi.

Tofografi kabupaten Dharmasraya adalah bervariasi antara daerah berbukit, bergelombang dan datar dengan tingkat kemiringan dan luas masing-masingnya sebagai berikut:

Tabel 2.12
Luas Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan tingkat kemiringan

Tingkat Kemiringan (%)	Luas (Ha)	(%)
a. 0-3	99.917	16,37
b. 3-8	84.796	13,92
c. 8-15	101.523	16,67
d. 15-25	112.991	18,55
e. 25-40	86.216	15,15
f. > 40	123.908	20,34

Dengan kemiringan lahan seperti diatas, lahan potensial untuk mengembangkan usaha komoditi pertanian secara umum seluas 184.515 Ha (kemiringan 0-3 % dan 3-8 %)

i. Tanah

Pada dasarnya jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terbagi 3 jenis yaitu: Padzolik Merah Kuning(ultisol), Latosol, Aluvial dan Histosal, Pola penggunaan tanah terluas adalah Hutan Negara yaitu 137.428 Ha, tambak 1.015 Ha, Padang Rumput 2.159 Ha, tegalan. Sementara luas perkebunan 72.891 Ha dan sawah 9.278 Ha. Khusus hutan Negara mencapai sekitar 22,6 % dari luas Kabupaten Dharmasraya.

Dengan pola penggunaan lahan seperti diatas, dapat di katakan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah menjadi kawasan budidaya. Hal ini tentunya akan lebih memberikan peluang lebih besar untuk pengembangan pertanian.

j. Hidrologi

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 59 sungai dengan panjang \pm 450,9 Km, 4 sungai di antaranya merupakan sungai – sungai besar yaitu : Batang Hari, Batang Siat, Batang Mimpi, Batang Piruko, Batang palangko dan semuanya bermuara ke Sungai Batang Hari. Kondisi dengan jumlah sungai yang banyak dan panjang, tersebut lebih memungkinkan untuk mengembangkan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

k. Permodalan

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat. Terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

2. Peluang

a. Pasar

Permintaan pasar terhadap produk pertanian seperti beras, jagung, kedele, buah, sayuran dan tanaman hias masih cukup besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama pasar lokal, regional dan bahkan internasional, Permintaan pasar terhadap produk peternakan juga masih sangat besar. Untuk pemenuhan konsumsi lokal saja produk peternakan masih berpeluang besar.

Konsumsi daging, telur, susu dan ikan masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 masing-masing adalah 4,5kg/cap/tahun, 2,07kg/cap/th, 1,07kg/cap/th dan 20,19kg/cap/th. Angka tersebut masih sangat jauh dibawah konsumsi nasional yaitu daging 10 kg/cap/th, telur 4 kg/cap/th, susu 8,2 kg/cap/th dan ikan 26 kg/cap/th. Selain itu posisi Kabupaten Dharmasraya yang berbatasan dengan propinsi Riau dan Jambi dinilai sangat strategis karena terdapat permintaan produk peternakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Permintaan yang cukup tinggi terhadap produk peternakan tersebut menjadi peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Dharmasraya.

b. Dana Penguatan dari Pemerintah dan Perbankan

Adanya dana penguatan modal dari pemerintah pusat, provinsi serta Kabupaten Dharmasraya, berupa Dana Tugas Pembantuan dan APBD yang dialokasikan untuk penguatan modal usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan peluang besar bagi petani untuk

mengembangkan usahanya. Sehingga masalah permodalan yang menjadi kendala utama selama ini diminimalisir.

Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplementasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.

Selain itu Pemerintah Pusat melalui dana dekonsentrasi juga menyiapkan dana penguatan modal untuk pengembangan usaha pertanian antara lain berupa bantuan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), kredit PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), KKP (Kredit Ketahanan Pangan), PKP (Peningkatan Ketahanan Pangan Agribisnis), dan lainnya.

c. *Sumber Daya Manusia*

Jumlah Penduduk Kab. Dharmasraya berdasarkan registrasi penduduk pada sensus 2015 tercatat sebanyak 195.256 jiwa, dan tercatat 89.419 yang bergerak diberbagai bidang usaha, 55.013 jiwa (66,16%) diantaranya bergerak di bidang pertanian.

Sektor perkebunan merupakan primadona bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya dimana penggunaan tanah untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, seluas 112.781,57 Ha yang terdiri dari 11 komoditi dengan swadaya, Pola Kemitraan, pola bapak angkat anak angkat, PIR TRANS dan PBSN. Potensi pengembangan lahan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya adalah seluas 35.900 Ha yang terdiri dari: Pengembangan karet 13.400 Ha, peremajaan karet 9.500 Ha,

pengembangan kelapa sawit 10.000 Ha dan pengembangan kakao 3.000 Ha.

Dengan memahami bahwa indikator utama pembangunan perkebunan adalah sumberdaya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Maka langkah awal yang telah ditempuh adalah dengan merangsang pertumbuhan areal-areal perkebunan baru di lahan budidaya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan OPD maka perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang bisa menghambat, adapun masalah-masalah tersebut adalah:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Akar Masalah
1	Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	Tercapai, tidak tercapai, rendah, tinggi	Belum tercapainya produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang nya prasarana dan sarana pertanian • Alih Fungsi Lahan Pertanian • Kualitas Sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi pertanian
2	Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet)		Belum tercapainya produksi dan produktivitas komoditi tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tanaman yang bersumber dari bibit unggul • tanaman yang sudah tua / tidak produktif • Kurangnya pengendalian OPT
3	Penurunan Penyakit Hewan Menular		Tingginya penyakit hewan menular (Rabies dan Jembrana)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ternak serta sulitnya melakukan vaksinasi • Minimnya peralatan dan obat-obatan dalam menanggulangi penyakit ternak

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan

prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Dharmasraya.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
- b) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- c) Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya;
- d) Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pertanian Kabupaten Dharmasraya, diantaranya adalah:

- a) Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal(internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi;
- b) Peraturan perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan-

peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang/pendukung;
- b. Terbatasnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan;
- c. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi guna memasuki era globalisasi dan liberalisasi pasar;
- d. Degradasi lahan karena penurunan kualitas tanah akibat perubahan lingkungan biofisik dan kerusakan alam;
- e. Degradasi lahan karena penurunan kualitas tanah akibat perubahan lingkungan biofisik dan kerusakan alam;
- f. Rendahnya nilai tambah dan daya saing pengolahan hasil produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
- g. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga muncul dan berkembangnya hama tanaman pertanian yang sulit terkendali dan kekeringan lahan serta kebakaran hutan dan lahan;
- h. Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
- i. Terbatasnya permodalan petani pertanian, berakibat pada masih minimnya tingkat pemahaman dan penerapan dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk perkebunan;
- j. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani perkebunan, mengakibatkan para petani tidak memiliki nilai tawar produk, terhambatnya penyerapan teknologi tinggi dan kurang terkendalinya pola usaha tani komoditas perkebunan.
- k. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat kesalahan pola tanam mengakibatkan erosi/tanah longsor dan pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang mengakibatkan rusaknya kesuburan tanah.

- l. Lemahnya status dan luas kepemilikan lahan, mengakibatkan petani tidak dapat mengembangkan areal produksi, sehingga kesulitan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya, serta lahan sempit mengakibatkan unit cost untuk produksi juga mahal.
- m. Belum optimalnya pemakaian benih/bibit unggul yang bersertifikat, mengakibatkan tanaman rentan terhadap hama penyakit berdampak produktifitasnya rendah.
- n. Petani belum terbiasa dan kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan pengendali hama hayati yang ramah lingkungan, karena hasilnya tidak langsung nampak.
- o. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, berakibat pada kesulitan dalam peningkatan produksi, produktifitas komoditas pertanian.
- p. Pemakaian alat mesin pertanian masih sangat tradisional/sederhana, sehingga proses penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama, kurang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam skala besar, serta mutu yang dihasilkan masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI
DAN BERBUDAYA”**

Visi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang Maju, Mandiri dan Berbudaya. Maka yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju:

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Mandiri:

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal.

Berbudaya:

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Sedangkan untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dari ke enam misi diatas terdapat misi ke-3 yang berhubungan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, dan perlu di telaah lebih dalam guna memudahkan OPD untuk merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan periode 2021-2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2.
Hubungan/Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI KE-3	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan daya saing daerah

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju, Mandiri dan Berbudaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 3: Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Prasana dan Sarana Pertanian	Kurang memadainya teknologi pertanian yang tersedia	Peningkatan pengetahuan penyuluh dan petani akan teknologi pertanian tepat guna
		Alih Fungsi Lahan	Pengetahuan masyarakat akan perlindungan LP2B	Keinginan masyarakat mengembangkan lahan sawah
		Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian	Kurangnya sumber air	Optimalisasi Lahan
		Tanaman yang sudah tua dan tidak produktif	Kurangnya tanaman yang menggunakan bibit unggul	Replanting

3.3. Telaahan Renstra kementerian dan Dinas Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas dan peranannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun yang akan datang, sebagai respon terhadap perkembangan dinamika lingkungan strategis baik regional maupun nasional ataupun global. Hal ini merupakan respon sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dengan berdasarkan kepada peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga tidak lupa

memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga institusi Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun kedepan (2016-2021) sebagaimana yang tercantum dalam renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional).

Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

- a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
- b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
- c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan,
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran,

- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

a. Renstra Kementerian Pertanian periode 2020–2024

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi, Misi, tujuan serta sasaran Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut :

**Tabel 3.4.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2020-2024**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan pangan. 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 4. Termanfaatkannya inovasi dan

			<p>teknologi pertanian.</p> <p>5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.</p> <p>6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.</p> <p>7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.</p> <p>8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.</p> <p>9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas</p>
--	--	--	---

Dari Renstra kementerian pertanian diatas maka dapat di telaah bahwa fokus pembangunan pertanian terletak pada peningkatan produksi bahan pangan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, hal ini tentu dapat diwujudkan dengan perbaikan sarana dan prasarana pertanian terutama irigasi, penambahan luas area persawahan, ketersediaan benih dan pupuk yang mencukupi, serta dukungan alat dan mesin pertanian yang memadai.

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Sasaran Dalam Renstra Kementerian Pertanian Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian. 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	1 Belum optimalnya pemanfaatan Sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan	1 Pemanfaatan lahan yang tidak optimal	1 Tersedianya lahan yang bisa dioptimalisasikan
	2 Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;	2 Kurang pahalannya petani akan manfaat pertanian	2 Tingginya motivasi untuk bertani
	3 Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan pertanian;	Tingginya intensitas koordinasi lintas sektor yang dilakukan Dinas Pertanian	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
		1 Keterbatasan SDM dan sarana prasarana mengolah data	Tingginya kebutuhan akan data
		2 Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Adanya pelatihan bagi tenaga ubinan serta pengolahan data pertanian

b. Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (2021 – 2026)

Pada Misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih terdapat misi yang berhubungan dengan pembangunan di sektor pertanian yaitu :

Misi 3 :

“ Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”

Dari misi diatas dapat dikembangkan menjadi sebuah tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas seperti terlihat pada tabel 3.6. dibawah ini:

Tabel 3.6.
Tujuan dan Sasaran Dinas PTPH Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 7. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi 9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi Lahan dan Air
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 2. Mendorong tumbuh petani milenial
		Pengembangan sistem Value Chain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses permodalan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani 3. Peningkatan pengawasan agroinput 4. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian 5. Pengembangan jaringan produk pertanian 6. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani 7. Pengintergrasian program pertanian

Tabel 3.7.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Sasaran Dalam Renstra Dinas PTPH Provinsi Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No	Sasaran Renstra Dinas PTPH Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;	Tingginya intensitas koordinasi lintas sektor yang dilakukan Dinas Pertanian	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
		Penyuluh Agribisnis	Kurang memadainya SDM penyuluh tentang agribisnis	Tingkat antusias masyarakat untuk beragribisnis
		Terbatasnya sarana dan prasarana	Ketersediaan anggaran	Pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien

c. Renstra Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat (2021-2026)

Pada Misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih terdapat misi yang berhubungan dengan pembangunan di sektor peternakan yaitu :

Misi 3 :

“ Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”

Dari misi diatas dapat dikembangkan menjadi sebuah tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas seperti terlihat pada tabel 3.8. dibawah ini:

Tabel 3.8.
Tujuan dan Sasaran Dinas PKH Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Produksi Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor, peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat 2. Mengoptimalkan pemakaian alsin peternakan untuk efisiensi usaha peternakan 3. Meningkatkan akses permodalan 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani (peternakan) 5. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan 6. Pengembangan jaringan pemasaran produk peternakan 7. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani (peternakan) 8. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian (Peternakan& Kesehatan Hewan) 9. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup 10. Meningkatkan pembibitan ternak lokal berbasis kawasan/ sentra dan kelompok ternak. 11. Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya pakan berbahan baku lokal 12. Peningkatan pelayanan keswan dan kesmavet di unit-unit pelayanan keswan dan kesmavet 13. Meningkatkan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 14. Meningkatkan kompetensi SDM peternakan dan kesehatan hewan 15. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas) 16. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan 2. Mendorong tumbuh petani milenial 3. Peningkatan aplikasi bioteknologi reproduksi bidang peternakan dan Kesehatan hewan

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam penetapan kawasan pertanian difokuskan pada daerah komoditi pertanian yaitu pada Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Koto Salak.

Adapun Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Dharmasraya disusun agar pemerintah daerah mempunyai pedoman untuk:

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten serta keserasian antar sektor
- Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
- Pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangaunan daerah
- Acuan bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Kawasan Pertanian tersebut akan dilakukan kegiatan yang tetap mengacu pada kajian lingkungan hidup, yang mana dalam dokumen KLHS untuk kawasan pertanian ditetapkan sama dengan dokumen RTRW.

Tabel 3.9.
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Pertanian

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Belum adanya penetapan KP2B yang terarah (Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan yang belum mengarah kepada pembangunan pertanian secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat antusias masyarakat untuk menjadikan lahan mereka pada KP2B • Perda No 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan LP2B

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Implikasi KLHS	Terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas Alih Fungsi lahan Penurunan Produktivitas Komoditi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan yang mewajibkan penyusunan setiap dokumen perencanaan berpedoman pada dokumen KLHS Pengembangan padi organik

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Berangkat dari permasalahan yang ditemui dalam pembangunan bidang pertanian serta dari hasil telaahan beberapa kebijakan tingkat atas, dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan pertanian yaitu:

1. Peningkatan kapasitas petani guna meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui sekolah lapang dan pelatihan teknis
2. Peningkatan pemakaian pupuk organik
3. Kecukupan produksi komoditas pangan strategis (padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah).
4. Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian Sebagai antisipasi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)
5. Pengawasan penggunaan LP2B sera menerapkan insentif dan disentif
6. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu.
7. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani.
8. Peningkatan Skala usaha peternakan relatif kecil
9. Peningkatan Kesejahteraan Petani
10. Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan
11. Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Perkebunan
12. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
13. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu. Sinergi dengan visi dan misi telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan pembangunan pertanian kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Pendapatan Petani.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Indikator pencapaian sasaran setiap tahun dalam kurun waktu 2021-2026 diuraikan pada bagian program dan kegiatan. Sasaran pembangunan Pertanian yang akan dicapai dalam periode tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Produksi Produk Unggulan Pertanian.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing

Tujuan RPJMD : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing

Sasaran RPJMD : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB			%	28,71	28,63	28,47	28,33	28,21	28,09	27,99
			Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Produksi padi	Ton	66.664	67.000	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
				Produksi jagung	Ton	4.069	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	Ton	104.992	100.000	103.000	103.000	103.500	103.500	104.000
				Produksi Karet	Ton	29.689	30.500	30.000	30.200	30.500	31.000	31.200

RENSTRA 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Populasi sapi/kerbau	Ekor	42.000	42.000	42.025	42.100	42.200	42.250	42.300
				Produksi Daging	Ton	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
				Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	%	3	3	4	5	5	5	5
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	B (66,2)	B (60,52)	B (64,416)	B (68,312)	BB (72,208)	BB (76,104)	A (80)
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	Nilai	#N/A	20,0	22,9	28,3	34,0	39,9	46,0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang, yaitu: meningkatkan kesejahteraan petani, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kesejahteraan petani tersebut maka diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga lebih baik atau lebih berkualitas.

Adapun strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran dan tujuan diatas dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA			
MISI	MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING			
TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan 2. Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar / KP2B; 2. Peningkatan Penggunaan Prasarana dan Sarana Teknologi Peratanian 3. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan SDG Hewan/Tanaman 4. Peningkatan dan Penyebaran benih bermutu bersertifikat
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; 2. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA			
MISI	MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING			
TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	1. Peningkatan pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (mental aparatur, Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan pelayanan publik. 2. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			2. Peningkatan kapasitas SDM atau TIM yang mendukung pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi birokrasi	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tentang Reformasi Birokrasi 2. Pemberian Reward and Punnishment dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Penilaian tenaga teladan di Lembaga OPD
			3. peningkatan kualitas penerapan 5 komponen saki di OPD	1. peningkatan kualitas perencanaan OPD 2. peningkatan kualitas evaluasi internal OPD 4. peningkatan kualitas indikator kinerja OPD 5. peningkatan capaian kinerja OPD 6. peningkatan kualitas laporan kinerja OPD

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA			
MISI	MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING			
TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan kooperasi pertanian. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh 3. Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tahun 2016-2021, maka dilaksanakan melalui program prioritas yang terdapat di dalam RPJMD serta kegiatan-kegiatan pendukung program berikut dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
							2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)			target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan)	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan																				Dinas Pertanian			
					66,664	Ton	67,000		67,000		67,500		67,500		67,500		67,500		404,000					
					4,069	Ton	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		24,000					
					104,992	Ton	100,000		103,000		103,000		103,500		103,500		104,000		617,000					
					29,689	Ton	30,500		30,000		30,200		30,500		31,000		31,200		183,400					
		3	27					24,331,135,000		25,411,127,500		30,308,819,250		32,536,530,025		34,331,484,705		37,150,703,613		183,585,600,093				
		3	27	02				20	1,747,225,000	23	2,200,947,500	25	2,416,792,250	27	2,635,721,475	30	2,858,043,623	35	3,084,097,985	35	14,942,827,832			
		3	27	02	2.01			10	237,225,000	10	260,947,500	10	286,792,250	10	314,971,475	10	345,718,623	10	379,290,485	60	1,824,945,332			
		3	27	02	2.01	01		15	212,225,000	20	233,447,500	20	256,792,250	20	282,471,475	13	310,718,623	13	341,790,485	106	1,637,445,332			
		3	27	02	2.01	02			96	25,000,000	96	27,500,000	96	30,000,000	96	32,500,000	96	35,000,000	96	37,500,000	576	187,500,000		
		3	27	02	2.02			4.1	250,000,000	4.7	530,000,000	4.8	585,000,000	4.9	640,000,000	5	695,000,000	5	750,000,000	5	3,450,000,000			
								0.8		0.8		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8					
								4.54		4.7		4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9					
								6.7		6.7		6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9					
									666.96		678.63		690.51		702.59		715		727		8.9			
									89		91		92		94		96		98		10.9			
									62		63		64		65		66		68		12.9			
									227		231		232		236		240		244		14.9			
		3	27	02	2.02	01		1,678	3425	50,000,000	3000	60,000,000	3500	70,000,000	4000	80,000,000	4000	90,000,000	4000	100,000,000	21,925	450,000,000		
								2,500	500		500		500		500		500		500		3,000			
		3	27	02	2.02	02		5000	3750	15000	250,000,000	15000	275,000,000	15000	300,000,000	15000	325,000,000	15000	350,000,000	78,750	1,500,000,000			
								50,000	15500	10000		10000		10000		10000		10000		65,500				
		3	27	02	2.02	03		5000	1000	200,000,000	1000	220,000,000	1000	240,000,000	1000	260,000,000	1000	280,000,000	1000	300,000,000	6,000	1,500,000,000		
		3	27	02	2.03					30	75,000,000	30	82,500,000	35	90,000,000	40	97,500,000	45	105,000,000	45	450,000,000			
		3	27	02	2.03	02				30	75,000,000	39	82,500,000	53	90,000,000	74	97,500,000	100	105,000,000	100	450,000,000			
		3	27	02	2.04					100	75,000,000	100	82,500,000	100	90,750,000	100	99,825,000	100	109,807,500	100	457,882,500			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah obat hewan yang diperiksa mutu, khasiat dan keamanan peredarannya	-	Jenis			5	75,000,000	5	82,500,000	5	90,750,000	5	99,825,000	5	109,807,500	25	457,882,500		
		3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia		Ekor	105	1,260,000,000	105	1,260,000,000	115	1,380,000,000	125	1,500,000,000	135	1,620,000,000	145	1,740,000,000	730	8,760,000,000		
		3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	pengadaan bibit sapi dan kambing, serta hewan ternak lainnya		Ekor	105	1,260,000,000	105	1,260,000,000	115	1,380,000,000	125	1,500,000,000	135	1,620,000,000	145	1,740,000,000	730	8,760,000,000		
		3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang terpelihara/terbangun		%	72	5,823,110,000	74	4,685,000,000	76	7,430,000,000	78	7,475,850,000	80	7,122,635,000	85	7,520,448,500	85	40,057,043,500		
		3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan		Dok			0	115,000,000	1	480,000,000	0	145,000,000	0	160,000,000	0	175,000,000	1	1,075,000,000		
		3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah LP2B yang dikelola		Ha			4603.38	115,000,000	4603.38	130,000,000	4603.38	145,000,000	4603.38	160,000,000	4603.38	175,000,000	4603.38	725,000,000		
		3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen revisi Peta LP2B		Dok					1	350,000,000							1	350,000,000		
		3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dilebih		Unit	23	5,823,110,000	23	4,570,000,000	26	6,950,000,000	26	7,330,850,000	24	6,962,635,000	25	7,345,448,500	147	38,982,043,500		
		3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Air Dangkal (JIAT) yang terbangun dan terpelihara		Unit	2	600,000,000	2	720,000,000	2	720,000,000	2	720,000,000	1	420,000,000	1	420,000,000	10	3,600,000,000		
		3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang terbangun dan terpelihara		Unit	3	200,000,000			2	400,000,000	2	400,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	7	1,400,000,000		
		3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT yang terbangun dan terpelihara		Km	4	3,750,000,000		2,400,000,000	4	4,250,000,000	4	4,500,000,000	4	4,500,000,000	5	4,750,000,000	21	24,150,000,000		
		3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dampar yang terbangun dan terpelihara		Unit	2	300,000,000	2	330,000,000	2	360,000,000	2	390,000,000	2	420,000,000	3	450,000,000	13	2,250,000,000		
		3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang terpelihara		Unit	1		1	85,000,000	1	93,500,000	1	102,850,000	1	113,135,000	1	124,448,500	1	518,933,500		
		3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhi di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang terpelihara		Unit	11	660,000,000	11	720,000,000	11	780,000,000	11	840,000,000	11	900,000,000	11	960,000,000	11	4,860,000,000		
		3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya yang terbangun dan terpelihara	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang terbangun dan terpelihara		Unit	5	313,110,000	5	315,000,000	5	346,500,000	5	378,000,000	5	409,500,000	5	441,000,000	30	2,203,110,000		
		3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian		%			100	525,000,000	100	575,000,000	100	625,000,000	100	675,000,000	100	725,000,000	100	3,125,000,000		
		3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas areal Bencana Pertanian yang ditangani		Ha	0		90	525,000,000	98	575,000,000	100	625,000,000	105	675,000,000	110	725,000,000	310	3,125,000,000		
		3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	luas areal penanganan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Ha	50		50	250,000,000	50	275,000,000	50	300,000,000	50	325,000,000	50	350,000,000	50	1,500,000,000		
				luas areal penanganan OPT Tanaman Perkebunan		Ha	25		40		48		50		55		60		60			
				Jumlah Pengendali OPT Tanaman Pangan		Kali	13		5		5		5		5		5		5			
				Jumlah Pengendali OPT Perkebunan		Kali	2		2		2		2		2		2		2			
		3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas Areal Asuransi Usaha Tani (AUTP)		Ha	639.86		200	275,000,000	200	300,000,000	200	325,000,000	200	350,000,000	200	375,000,000	200	1,625,000,000		
		3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Naik kelas		Kelompok	60	575,000,000	65	575,000,000	70	605,000,000	75	635,000,000	80	665,000,000	85	695,000,000	85	3,750,000,000		
		3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani/kelompok tani yang meningkat kapasitasnya		Kelompok	7	575,000,000	7	575,000,000	7	605,000,000	7	635,000,000	7	665,000,000	7	695,000,000	42	3,750,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)			
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		3 27 07	2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	11	BPP	11	275,000,000	11	275,000,000	11	275,000,000	11	275,000,000	11	275,000,000	11	1,650,000,000						
				3 27 07 2.01 03	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang tersedia	Unit	44	300,000,000	44	300,000,000	44	330,000,000	44	360,000,000	44	390,000,000	44	420,000,000	264	2,100,000,000				
							Populasi sapi/kerbau	42,310	Ekor	42,000		42,025		42,100		42,200		42,250		42,300		210,875			
							Produksi Daging	1,225	Ton	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		6,000			
							Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	2.33%	%	3		4		5		5		5		5		24			
		3 27 04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Angka Kelahiran Ternak	%	5	250,000,000	5	475,000,000	5	517,500,000	5	561,500,000	5	608,650,000	5	658,515,000	40	3,071,165,000					
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3 27 04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	%	100	250,000,000	100	400,000,000	100	435,000,000	100	471,500,000	100	509,650,000	100	549,615,000	100	2,615,765,000					
				3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kasus kejadian penyakit ternak yang ditangani	694	Kasus	520		364	150,000,000	255	165,000,000	178	181,500,000	115	199,650,000	54	219,615,000	54	915,765,000			
							operasional Unit pelayanan Puskesmas	1	Unit	6		6		6		6		6		6		6			
				3 27 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembebasan penyakit hewan menular	52	Nagari/Desa	52	175,000,000	52	175,000,000	52	190,000,000	52	205,000,000	52	220,000,000	52	235,000,000	52	1,200,000,000			
				3 27 04 2.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah daerah yang terdampak wabah penyakit hewan menular yang tertanggulangi/ jumlah lokasi penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	52	Nagari/Desa	52	75,000,000	52	75,000,000	52	80,000,000	52	85,000,000	52	90,000,000	52	95,000,000	52	500,000,000			
				3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	%	-	80	75,000,000	80	82,500,000	80	90,000,000	80	99,000,000	80	108,900,000	80	118,800,000	80	455,400,000			
				3 27 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan pada lalu lintas ternak	-	dokumen	-	200	75,000,000	200	82,500,000	200	90,000,000	200	99,000,000	200	108,900,000	350	455,400,000				
				3 27 06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	20,000,000	100	22,500,000	100	25,000,000	100	27,500,000	100	30,000,000	100	32,500,000	100	157,500,000			
				3 27 06 2.02		Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang terbit	100	%	100	20,000,000	100	22,500,000	100	25,000,000	100	27,500,000	100	30,000,000	100	32,500,000	100	157,500,000		
				3 27 06 2.02 01		Penatausahaan Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	5	Dok	5	20,000,000	5	22,500,000	5	25,000,000	5	27,500,000	5	30,000,000	5	32,500,000	25	157,500,000		
				Nilai AKIP Dinas Pertanian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	B (66.2) m/A	Nilai/ Predikat Nilai	B (60.52) 20	B (64.416) 22.9	B (68.312) 28.3	BB (72.208) 34	BB (76.104) 39.9	A (80) 46	A (80) 46												
3 27 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	15,915,800,000	100	16,927,680,000	100	18,739,527,000	100	20,575,958,550	100	22,372,156,083	100	24,435,142,128	100	118,482,063,761						
3 27 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja	Dok	8	25,000,000	8	25,000,000	8	27,500,000	8	30,250,000	8	33,275,000	9	36,602,500	49	177,627,500						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	target	Rp. (.000)	Target	Rp. (.000)						
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
		3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja, penyusunan SAKIP, LKIP, LPPD, LKPI dan Pelaporannya		Dok	8	25,000,000	8	25,000,000	8	27,500,000	8	30,250,000	8	33,275,000	9	36,602,500	49	177,627,500		
		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		Bek	3	13,507,500,000	3	13,507,500,000	3	14,858,250,000	3	16,344,075,000	3	17,978,482,500	5	19,776,330,750	20	95,972,138,250		
		3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan		Org	129	13,500,000,000	129	13,500,000,000	129	14,850,000,000	129	16,335,000,000	129	17,968,500,000	129	19,765,350,000	774	95,918,850,000		
		3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran		Dok	3	7,500,000	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	9,982,500	5	10,980,750	20	53,288,250		
		3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang tersusun		Dok		-		-	2	35,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	110,000,000		
		3	27	01	2.03	02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD		Dok		-		-	2	35,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	110,000,000		
		3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		OK		-	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	50	300,000,000		
		3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Diklat		OK		-	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	50	300,000,000		
		3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum		Bln	12	361,300,000	12	352,980,000	12	414,377,000	12	468,533,550	12	530,458,583	12	602,315,378	12	2,729,964,511		
		3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Bola Lampu, Terminal, Fitting, Stok Kontak, Kabel yang diperlukan untuk penerangan kantor		Jenis	5	10,000,000	5	10,000,000	5	11,000,000	5	12,100,000	5	13,310,000	5	14,641,000	30	71,051,000		
		3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk pelaksanaan tupoksi		Jenis	17	31,800,000	20	34,980,000	20	40,227,000	20	46,261,050	20	53,200,208	20	58,520,228	117	264,988,486		
		3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan Peralatan Rumah Tangga		Jenis	18	10,000,000	18	11,000,000	18	12,650,000	18	14,547,500	18	16,729,625	18	18,402,588	108	83,329,713		
		3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak map, spanduk dan fotocopy		Jenis	3	24,500,000	3	26,000,000	3	28,000,000	3	30,000,000	3	32,000,000	3	35,000,000	18	175,500,000		
		3	27	01	2.06	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Makan Minum Kantor		Bks/ktk	1,000	35,000,000	600	21,000,000	1,000	35,000,000	1,000	35,000,000	1,000	35,000,000	1,100	38,500,000	5,700	199,500,000		
		3	27	01	2.06	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti		Tahun	1	250,000,000	1	250,000,000	1	287,500,000	1	330,625,000	1	380,218,750	1	437,251,563	6	1,935,595,313		
		3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		Jenis		-	13	465,000,000	23	661,500,000	28	787,650,000	18	693,915,000	13	680,806,500	95	3,288,871,500		
		3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 Penyuluh		Unit		-		-	10	150,000,000	15	225,000,000	5	75,000,000	-	-	30	450,000,000		
		3	27	01	2.07	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jenis		-	4	250,000,000	4	275,000,000	4	302,500,000	4	332,750,000	4	366,025,000	20	1,526,275,000		
		3	27	01	2.07	24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan gedung kantor & Jumlah Pengadaan Meubeleur		Jenis		-	9	215,000,000	9	236,500,000	9	260,150,000	9	286,165,000	9	314,781,500	45	1,312,596,500		
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum		Bln	12	1,672,000,000	12	1,752,200,000	12	1,841,400,000	12	1,934,800,000	12	2,032,810,000	12	2,134,050,500	72	10,883,060,500		
		3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan material 10rb		bh	200	2,000,000	220	2,200,000	240	2,400,000	260	2,600,000	300	3,000,000	200	2,000,000				
		3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik		Bln	12	70,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000	12	85,000,000	12	90,000,000				
		3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran honor PA, PPTK, Bendaharan Pengeluaran, Penerimaan dan THL		Bln	12	1,600,000,000	12	1,680,000,000	12	1,764,000,000	12	1,852,200,000	12	1,944,810,000	12	2,042,050,500	72	10,883,060,500		
		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		Unit	146	350,000,000	171	765,000,000	171	841,500,000	176	925,650,000	176	1,018,215,000	201	1,120,036,500	1,041	5,020,401,500		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah hingga tahun 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasrayan Tahun 2016-2021, Tolak Ukur Kinerja Pembangunan Kabupaten Dharmasraya selama periode 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produksi padi	Ton	66.664	67.000	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500	404.000
2	Produksi jagung	Ton	4.069	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
3	Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	Ton	104.992	100.000	103.000	103.000	103.500	103.500	104.000	617.000
4	Produksi Karet	Ton	29.689	30.500	30.000	30.200	30.500	31.000	31.200	183.400
5	Populasi sapi/kerbau	Ekor	42.310	42.000	42.025	42.100	42.200	42.250	42.300	252.875
6	Produksi Daging	Ton	1.225	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200
7	Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	2,33%	3	4	5	5	5	5	27
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	B (66,2)	B (60,52)	B (64,416)	B (68,312)	BB (72,208)	BB (76,104)	A (80)	A (80)
9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	Nilai	#N/A	20,0	22,9	28,3	34,0	39,9	46,0	46,0

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dharmasraya dan bersifat indikatif.

Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan misi Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Pulau Punjung, Mei 2021
DINAS PERTANIAN KAB.DHARMASRAYA
KEPALA



DAKISMAN S.Si., M.M.
NIP. 19750217 200003 1 001